

MULTIKULTURALISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

Sapari

STIT Buntet Pesantren
Sapaar6@gmail.com

Abstract

One aspect of humanism that is now being talked about and becoming important issues in the debate discourse is about understanding pluralism and multiculturalism in various fields of study. Various interpretations and thoughts developed in the community regarding these two issues. The emergence of this discourse is also inseparable from the condition of the Indonesian people who are destined to have ethnic, cultural and religious diversity. This study examines the discourse of pluralism and multiculturalism in the Islamic religious education system and how it exists in the Islamic religious education system. This study adopts library research which contains a collection of in-depth material on one or several subjects. The subject or material studied in this study is about. This study concludes that including the values of pluralism and multiculturalism in the Islamic religious education system is a necessity, as concrete efforts and steps to transform patterns of religious understanding that are inclusive, dynamic, and flexible without neglecting the sacred dimensions of religious teachings.

Keywords: *library research; multiculturalism; Islamic education*

Abstrak

Salah satu aspek humanisme yang sekarang ramai dibicarakan dan menjadi isu-isu penting dalam wacana perdebatan adalah mengenai paham pluralisme dan multikulturalisme dalam berbagai bidang kajian. Berbagai interpretasi dan pemikiran yang berkembang ditengah masyarakat mengenai kedua isu tersebut. Munculnya wacana tersebut juga tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia yang ditakdirkan Allah memiliki keragaman etnik, budaya, dan agama. Studi ini mengkaji mengenai wacana pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam dan bagaimana keberadaannya dalam sistem pendidikan agama Islam. Studi ini mengadopsi penelitian kepustakaan (Library Research) dimana berisi koleksi materi yang mendalam pada satu atau beberapa subjek. Adapun subyek atau materi yang dikaji dalam studi ini adalah mengenai. Studi ini menyimpulkan bahwa memasukkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam merupakan suatu keniscayaan, sebagai upaya dan langkah kongkrit dalam mentransformasikan pola pemahaman keagamaan yang inklusif, dinamis, dan fleksibel dengan tanpa mengabaikan dimensi-dimensi kesakralan ajaran agama.

Keywords: *Studi kepustakaan; multikulturalisme; pendidikan Islam*

Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan umum mulai dari tingkat dasar sampai

perguruan tinggi, merupakan bagian dari pendidikan Islam yang sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Pendidikan Islam mempunyai tujuan penting yakni

membangun karakter muslim yang memahami ajaran agamanya serta mempunyai kesadaran imani yang diejawantahkan kedalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai bentuk pengamalan agama. Hasil yang ingin dicapai dari pendidikan Islam adalah menciptakan manusia beradab dalam pengertian yang menyeluruh meliputi kehidupan spiritual dan material (Daud: 1998, 174).

Namun pada kenyataannya berbicara lain, pendidikan agama Islam (PAI), secara umum belum mampu menyuguhkan sumbangsih yang berarti terhadap peningkatan moralitas dan sikap toleransi, khususnya di kalangan peserta didik. Hal ini sangat berkaitan dengan prosesnya di lapangan. Dalam kenyataannya peserta didik selalu diarahkan pada penguasaan teks- teks yang terdapat dalam buku pengajaran. Para peserta didik selalu dihadapkan pada pertanyaan dan hapalan kulti luarnya saja (ranah kognitif), sedangkan substansinya berupa penanaman nilai- nilai agama hilang begitu saja seiring dengan bertumpuknya pengetahuan kognitif mata pelajaran yang ada di sekolah (Sutrisno: 2011, 85).

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan selama ini pada lembaga- lembaga pendidikan umum mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi lebih bersifat “Transfer Ilmu pengetahuan”. Prosesnya lebih menekankan kepada pencapaian penguasaan ilmu- ilmu agama. Pemaknaan teks (materi) yang kurang memadai dengan tuntutan kemampuan kontekstualisasi yang dihadapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari menyebabkan peserta didik kurang menghayati nilai- nilai agama sebagai nilai hidup dalam keseharian.

Konsekuensinya pendidikan agama Islam yang diajarkan menjadi kurang

bermakna. Kebanyakan peserta didik meningkat pengetahuannya tentang agama, akan tetapi penghayatan dan pengamalan terhadap nilai- nilai agama, terutama yang bersentuhan dengan nilai- nilai humanis dalam bentuk kepedulian sosial kurang teraktualisasi dalam kehidupan sehari- hari. Bahkan, tidak jarang pendidikan agama yang membawa kepada kecenderungan sikap dan perilaku peserta didik yang tertutup dan cinta buta. Sikap tersebut inilah yang pada gilirannya melahirkan sikap intoleransi terhadap perbedaan agama dan sulit menerima perbedaan etnis dan budaya. Sementara keragaman agama, etnis, dan budaya adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima dengan lapang dada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah negara kesatuan republik Indonesian yang kita cintai ini.

Kurang berkembangnya konsep humanisme atau pendidikan agama yang berbasis problem sosial dalam sistem pendidikan agama Islam karena dalam praksisnya pendidikan agama lebih berorientasi pada konsepsi manusia sebagai “abdullah” yang lebih menekankan pada pemahaman keagamaan yang dimaknai sebagai ritual dalam bentuk ibadah maghdah yang hanya melahirkan manusia- manusia yang “saleh” secara individual namun tidak secara sosial (Abdul Munir: 2005, 190).

Salah satu aspek humanisme yang sekarang ramai dibicarakan dan menjadi isu- isu penting dalam wacana perdebatan adalah mengenai paham pluralisme dan multikulturalisme dalam berbagai bidang kajian. Berbagai interpretasi dan pemikiran yang berkembang ditengah masyarakat mengenai kedua isu tersebut. Munculnya wacana tersebut juga tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia yang ditakdirkan

Allah memiliki keragaman etnik, budaya, dan agama.

Secara historis, pengakuan terhadap kenyataan keragaman agama secara yuridis-formal telah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa ini dengan memasukkan nilai-nilai pluralisme keagamaan ke dalam rumusan Pancasila (sila pertama) dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan landasan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Begitu juga nilai-nilai multikulturalisme yang dituangkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Bahkan secara sosio-kultural, Indonesia pernah menjadi teladan percontohan sebuah kehidupan masyarakat pluralistik yang ideal.

Namun belakangan pandangan tersebut sudah tidak relevan lagi, karena sejak beberapa dekade ini, umat Islam Indonesia dihadapkan pada isu-isu terorisme dan radikalisme. Banyak ditengarai bahwa aksi-aksi kekerasan yang terjadi dilakukan oleh oknum-oknum atau ormas-ormas yang berlabelkan dan mengatasnamakan agama. Aksi-aksi kekerasan tersebut sekaligus menggambarkan sikap intoleransi yang lebih mendominasi terhadap perbedaan agama, etnik, dan budaya.

Walaupun fakta dominan sebenarnya menunjukkan bahwa faktor kesewenangan kelas sosial, kesenjangan ekonomi dan penindasan yang terajut dalam ketidakadilan sosial adalah sumber dan muara konflik (Azzumardi Azra: 1996, 18). Namun agama sepertinya sudah terlanjur ditasbihkan sebagai sumber dan pemicu konflik sosial dan negara. Meskipun secara normatif sesungguhnya tidak ada satupun agama yang menganjurkan pemeluknya untuk melakukan tindak kekerasan. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak jarang kita jumpai tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat agamis.

Oleh karenanya, Paradigma pendidikan agama Islam yang masih terbatas pada *to know, to do* dan *to be*, harus diarahkan kepada *to live together*. Artinya, bahwa kemampuan anak didik untuk dapat hidup bersama orang lain yang berbeda etnis, budaya dan agama, semestinya menjadi nilai yang melekat dalam tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan untuk menjadikan anak didik memiliki pemahaman dan perilaku religius yang berjalan paralel dengan kemampuan mereka untuk dapat hidup bersama orang lain yang berbeda etnik, budaya, dan agama.

Berangkat dari pemaparan diatas, tulisan ini berupaya menggambarkan tentang wacana pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam dan bagaimana keberadaannya dalam sistem pendidikan agama Islam.

Metode

Studi ini mengadopsi penelitian kepustakaan (Library Research) dimana berisi koleksi materi yang mendalam pada satu atau beberapa subjek (Young, 1983; p.188). Studi ini mencakup pemasukan sumber primer serta sumber sekunder. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

Secara garis besar, sumber bacaan yang dipakai pada studi ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Sumber acuan umum yang biasanya berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensklopedi, monograp, dan sejenisnya.

- b. Sumber acuan khusus yaitu berupa jurnal, bulletin penelitian, tesis dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

1. Paham Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Diskursus

Sebagaimana dimaklumi, bahwa ide dan gagasan awal dari paham pluralisme dan multikulturalisme ini lahir dari rahim dan semangat liberalisme. Kemudian dalam konteks kekinian dan kedisinian arus dan gelombang terkait keberadaan pluralisme dan multikulturalisme semakin meningkat yang disebabkan kemunculan wacana posmoderenisme atau yang lebih dikenal dengan istilah globalisasi yang membawa iklim baru dalam pergulatan teori-teori kritik sosial yang berwawasan global. Globalisasi didefinisikan sebagai perubahan-perubahan struktural dalam seluruh kehidupan negara bangsa yang mempengaruhi elemen-elemen dasar pengaturan hubungan antar manusia, organisasi-organisasi sosial dan pandangan-pandangan dunia (Amer: 2002, 7).

Pluralisme dan multikulturalisme adalah dua hal yang sesungguhnya sama tapi tak serupa. Istilah pluralisme secara umum merujuk pada suatu cara pandang yang berorientasi kemajemukan. Gagasan ini dicangkokkan pada berbagai ranah atau berbagai subjek pengetahuan, kemudian mengkristal sebagai suatu isme tersendiri terkait eksistensi suatu agama dalam kemajemukan (plural). Karena itu, dalam kajian-kajian dan wacana sosio-ilmiah sering digunakan istilah “pluralisme agama”.

Sedangkan konsep multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, hak asasi manusia, hak

budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat dan mutu produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang lebih relevan (Parsudi Suparlan: 2002, 16).

Konsep tersebut senada dengan apa yang dikemukakan Bloom dalam Atmadja, bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Dengan konsep lebih sederhananya bahwa multikulturalisme adalah sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Dalam wacana pemikiran Islam, pluralisme dan multikulturalisme masih merupakan hal baru dan tidak mempunyai akar ideologis atau bahkan teologis yang kuat. Keberadaan pluralisme dan multikulturalisme khususnya untuk konteks Indonesia telah menjadi wacana perdebatan yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendekiawan muslim sekaligus nampaknya juga memunculkan pro dan kontra dikalangan para pemikir, cendekiawan dan para tokoh agama.

Paham multikulturalisme, yang sejak beberapa tahun terakhir terus menggelinding dalam wacana kajian keislaman dan pendidikan. Dalam bukunya, Abdul Munir Mul Khan secara tegas menolak pendidikan tauhid seperti yang dipahami kaum muslimn selama ini. Sebagai gantinya, dia mengajukan gagasan “pendidikan Islam Multikultural”. “ Jika tetap teguh pada rumusan tujuan pendidikan (agama) Islam dan tauhid yang sudah ada,

maka fungsional dan rumusan itu perlu dikaji ulang dan dikembangkan lebih substantif. Dengan demikian diperoleh suatu rumusan bahwa Tuhan dan ajaran atau kebenaran yang satu yang diyakini pemeluk Islam itu bersifat universal. Karena itu, Tuhan dan ajaran-Nya serta kebenaran yang satu itu mungkin juga diperoleh pemeluk agama lain dan rumusan konseptual yang berbeda. Konsekuensi dari rumusan di atas ialah bahwa Tuhannya pemeluk agama lain, sebenarnya itulah Tuhan Allah yang dimaksud dan diyakini pemeluk Islam. Kebenaran ajaran Tuhan yang diyakini pemeluk agama lain itu pula sebenarnya yang merupakan kebenaran yang diyakini oleh pemeluk Islam (Abdul Munir: 2005, 182).

Pandangan Munir di atas merupakan refleksi terhadap sistem pendidikan agama yang ada selama ini kaitannya dengan keragaman kemanusiaan yang menurutnya jauh dari nilai-nilai himanisme. Melalui pandangannya tersebut, ia ingin mengemukakan bahwa sudah saatnya melihat masalah keagamaan dalam perspektif humanisme, bukan sudut pandang Islam, Kristen, Yahudi, atau agama-agama lain.

Bila dicermati, maka perbedaan ini nampaknya berkaitan dengan term pluralisme agama dan multikulturalisme serta perbedaan dalam memahami isyarat-isyarat ayat Al quran tentang pluralitas maupun tentang klaim kebenaran dalam suatu agama. Karena selama ini belum ada kata sepakat tentang pemahaman dan pemaknaan terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme. Dan menurut penulis, perbedaan tersebut muncul akibat adanya satu kerancuan logika yang terjadi. Satu sisi kita sepakat dan mengakui tentang realitas yang pluralis, sedangkan disisi yang lain

kita tidak sepakat tentang paham pluralisme.

Menurut penulis, gagasan mengenai pluralisme dan multikulturalisme dalam perspektif Islam adalah merupakan salah satu bentuk upaya pembaharuan pemikiran dan kajian keislaman sebagai respon terhadap perubahan zaman. Karena pembaharuan telah dimaknai sebagai istilah peyoratif, dengan konotasi tertentu dan membawa kecurigaan dikalangan luas, tidak saja dilingkungan awam tapi juga dikalangan terpelajar. Dalam perspektif historis, kita dapati sejak awal pembaharuan dalam Islam digulirkan yaitu sekitar awal abad 20, sudah terjadi sikap pro-kontra terhadap pembaharuan tersebut.

Selain itu yang perlu digaris bawahi, bahwa sesungguhnya paham pluralisme dan multikulturalisme telah menjadi komoditas politik dan terus bergulir dalam ranah pendidikan nasional termasuk pendidikan agama Islam yang secara integral bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini bisa dilihat dari undang-undang Sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003, juga kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan kurikulum KTSP yang meniscayakan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kepada potensi daerah dan nilai-nilai budaya lokal. Dari sistem pendidikan sentralistik berubah menjadi desentralistik. Kebijakan ini tidak terlepas dari munculnya kesadaran para tokoh dan pemimpin negeri ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan heterogen.

Oleh sebab itu, tidak mungkin membangun negeri ini tanpa mempedulikan nilai-nilai pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan Kunandar:

“KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan

otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing daerah. Kurikulum harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat luas dalam menghadapi persoalan kehidupan yang dihadapi.”

Senada dengan pandangan Amin Abdullah yang menyatakan bahwa dapat dibayangkan bagaimana kualitas tingkat kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian suatu masyarakat beragama yang bersifat pluralistik, jika masing-masing secara sepihak dan tertutup mengklaim bahwa tradisi agamanya sendirilah yang paling sempurna dan benar. Dan jika klaim itu merambah ke wilayah historis-ekonomis-sosiologis, maka kedamaian yang diserukan dan didambakan oleh ajaran agama-agama akan terkikis dengan sendirinya dalam kenyataan hidup keseharian. Meskipun secara ontologis-metafisis, klaim seperti itu memang dapat dimengerti, namun belum tentu dapat dibenarkan, karena memang itulah salah satu inti keberagaman yang sebenarnya. Artinya, bahwa *hard core* dari pada pandangan hidup agama-agama yang beraneka ragam memang berbeda. Sedangkan *hard core* keberagaman hanya dapat dinikmati secara historis, lewat sekat-sekat teologis yang ada.

Keragaman dan kemajemukan manusia adalah sebagai desain Tuhan yang harus diamalkan berupa sikap dan tindakan yang menjunjung pluralisme dan multikulturalisme. Namun tidak sekedar berhenti pada wacana pentingnya pluralisme dan multikulturalisme, akan tetapi lebih diejawantahkan pada tataran praksis melalui jalur pendidikan, termasuk pendidikan Agama Islam, serta praktek-praktek saling kerja sama, saling menghargai, saling menghormati dan saling memahami yang melibatkan berbagai

komunitas lintas agama dan etnis yang dibangun berdasarkan pengakuan atas persamaan, kesetaraan dan keadilan.

2. *Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Sistem Pendidikan Agama Islam*

Secara konseptual-normatif, pendidikan agama Islam (PAI) yang terdapat pada lembaga-lembaga pendidikan umum dimaksudkan sebagai upaya dalam membangun dan menumbuhkan sikap kebhinekaan berupa toleransi terhadap perbedaan etnik, budaya dan agama di kalangan peserta didik. Meskipun sebenarnya hal ini bukan semata tanggung jawab pendidikan agama Islam, namun pendidikan agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam membangun dan menanamkan sikap toleransi serta kesadaran menerima perbedaan etnik, budaya dan agama di kalangan peserta didik.

Namun realitanya, banyak kalangan yang menilai kegagalan pendidikan agama Islam dalam membangun dan menumbuhkan sikap toleransi dan kesadaran menerima perbedaan etnis, budaya dan agama yang sesungguhnya bersifat manusiawi (humanis). Sikap kritis tersebut telah memunculkan wacana dan gagasan tentang perlunya memasukkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui dan menerima adanya kemajemukan sosial, budaya, dan agama. Namun kenyataannya, permasalahan toleransi ini masih sering muncul dalam suatu masyarakat.

Faktanya masih saja dijumpai perlakuan-perlakuan diskriminatif terutama dalam tatanan sosial-kemasyarakatan. Di kalangan umat Islam misalnya, selalu saja

muncul sikap-sikap yang menunjukkan adanya kecurigaan dan sentimen terhadap orang lain yang berbeda agama. Begitu juga dengan komunitas lain, seperti etnis china yang selalu tertutup dan hanya bergaul dengan sesama komunitasnya saja.

Menurut Alwi Shihab, menyatakan bahwa konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut “kebenaran” atau “nilai” ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya (Alwi Shihab: 1999, 41).

Berdasarkan pandangan tersebut yang menjadi *core* dari paham pluralisme adalah bukan hanya sekedar adanya pengakuan terhadap pluralitas dalam realitas, yang ditunjukkan dalam sikap saling menghargai dan menghormati, tetapi lebih dari itu dituntut adanya upaya yang secara aktif yang ditunjukkan dalam bentuk saling bekerja sama dan saling memahami ajaran agama masing-masing. Begitu juga dalam menyikapi perbedaan budaya, karena setiap perilaku budaya memiliki makna filosofis (nilai-nilai) yang terkandung di dalamnya, suatu budaya tidak lahir dalam ruang hampa yang bebas nilai.

Nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme berpengaruh signifikan dalam upaya membentuk pola pemahaman keagamaan di kalangan peserta didik. Nilai-nilai tersebut tidak hanya tertuang dalam muatan kurikulum pendidikan agama Islam, namun juga tercermin dari pemahaman guru yang diaplikasikan dengan pendekatan dan metode yang digunakan dalam proses pendidikan agama Islam. Pandangan dan pemahaman yang positif bagi guru agama terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme pada gilirannya akan mampu mentransformasikan pola pemahaman keagamaan yang inklusif di

kalangan peserta didik. Pada posisi ini, pendidikan agama Islam memegang peranan kunci dalam menginternalisasikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme di kalangan peserta didik.

Namun faktanya, kelemahan pendidikan agama Islam yang berlangsung saat ini, antara lain:

- a). Pendekatan masih cenderung normatif, dimana pendidikan agama menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi sosial-budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.
- b). Kurikulum yang dirancang hanya menawarkan minimum kompetensi, tetapi pihak guru PAI sering kali terpaku dengannya. Sehingga kreativitas untuk memperkaya materi kurang tumbuh, begitu juga dalam hal penerapan metode pembelajaran yang cenderung bersifat monoton (Siti Malika: 1999, 20).

Dalam konteks ini pendidikan agama Islam lebih diposisikan secara pasif (cenderung Jabariyyah yang fatalisme), sehingga pendidikan agama Islam sebagai suatu proses cenderung mengalami kebekuan dan kekakuan dalam implementasinya. Output yang dihasilkannya sudah pasti tidak relevan dengan konteks zaman alias tertinggal, bahkan tidak jarang bertabrakan dengan kondisi sosial yang ada dan dapat memicu terjadinya konflik horizontal.

Bila menelisik fenomena sosial yang berkembang saat ini, menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan etnis, budaya dan agama yang selama ini ada dalam sistem pendidikan agama Islam masih jauh dari harapan. Dengan perkataan lain pemahaman keagamaan yang dibangun melalui proses pendidikan agama Islam masih jauh dari nilai-nilai pluralisme dan

multikulturalisme yang merupakan bagian dari nilai-nilai humanisme.

Indikasi kegagalan tersebut tidak terlepas dari peranan guru pendidikan agama dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada peserta didik. Ada sinyalemen bahwa pemahaman keagamaan yang dibangun selama ini melalui pendidikan agama berangkat dari suatu pandangan yang memosisikan “agama” sebagai sebuah ajaran yang bersifat absolut, statis, baku. Konsekuensinya pemahaman dan pandangan terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme hanyalah sebatas pada tatanan wacana pemikiran kajian keIslaman. Bahkan lebih ekstrim, muncul kecenderungan memaknainya sebagai sebuah propaganda Barat dalam upaya menyerang dan menghapus tradisi-tradisi Nabi dan Sahabat yang selama ini secara konsisten dilestarikan oleh kelompok Islam fundamentalis.

Amin Abdullah dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa guru-guru agama di sekolah yang berperan sebagai ujung tombak pendidikan agama dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling tinggi, nyaris kurang tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan diseputar isu pluralisme dan multikulturalisme. Padahal sejatinya guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menterjemahkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme kepada peserta didik. Dimana pada tahap selanjutnya juga ikut berperan aktif dalam mentransformasikan kesadaran toleransi secara lebih intensif dan massif.

Pendekatan pemahaman yang bercorak *tekstual-literal* yang cenderung tidak mempertimbangkan analisis historis, sosiologis, serta psikologis. Implikasinya adalah pemahaman terhadap Alquran

maupun teks tafsir bisa bersifat dangkal dan mudah terjebak ke dalam sikap sosial yang *apologetik* dan *eksklusif*. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemahaman yang dihasilkan cenderung tidak memberi ruang toleransi, apresiasi, dan pengakuan terhadap pihak lain, utamanya pemeluk agama lain. Tentunya hal ini dapat menyulut sikap-sikap intoleran dan fanatisme buta yang pada akhirnya akan membuat rapuh *kohesivitas* sosial dan rentan konflik.

Berdasarkan argumentasi diatas, agaknya di sinilah letak problematika yang mendasar dalam sistem pendidikan agama Islam yang cenderung mengabaikan nilai-nilai humanisme yang plural dan multikultural. Hal ini disebabkan paradigma tekstual-literal yang mendominasi sebagai landasan berpikir di kalangan guru-guru agama Islam.

3. Signifikansi Pendidikan Multikultural

Bangsa Indonesia sebagai negara Bhineka Tunggal Ika yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, strata sosial. Hal ini tentunya sangat mendambakan keserasian dalam perbedaan-perbedaan baik dalam hal agama, politik, keamanan, strata sosial maupun pendidikan dalam upaya menciptakan negara dan bangsa yang berkeadilan sosial sebagai cerminan dari dasar negara Pancasila.

Salah satu jalan untuk mencapai dambaan di atas adalah melalui Pendidikan multikultural. Pendidikan Multikultural diharapkan bisa dijadikan sarana membangun toleransi atas keragaman etnik, budaya, dan agama, serta strata sosial dari masyarakat suatu bangsa, karena pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah.

Pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah memiliki signifikansi yang besar bagi peserta didik, diantaranya:

1) Sebagai sarana pemecahan konflik

Pelaksanaan pemberian pendidikan multikultural di lembaga pendidikan diyakini menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmoni yang terjadi di dalam masyarakat, sebagai salah satu side effect dari kepluralisme masyarakatnya. Karena, pertama, pendidikan multikultural mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya. Serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. Kedua, melalui pendidikan multikultural yang menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, akan meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan.

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan multikultural dapat dikategorikan berhasil bila mana didalam peserta didik terbentuk sikap hidup saling menghargai, saling toleransi, tidak bermusuhan dikarenakan perbedaan budaya, ras, etnik, agama, dan strata sosial, serta tradisi.

2) Sebagai upaya agar siswa tidak tercerabut dari akar budaya

Dalam era globalisasi masuknya budaya asing yang sangat bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia merupakan ancaman yang sangat serius bagi peserta didik. Karena berbagai budaya saat ini berbaur dengan banyak budaya asing yang semakin mudah didapatkan melalui beragam media sebagai dampak dari kemajuan zaman, kecanggihan teknologi mempersingkat jarak sehingga memudahkan persentuhan antar budaya.

Untuk mensikapi realitas globalisasi tersebut, perlu adanya antisipasi, sebagai solusi kongkrit. Antara lain dengan cara peserta didik haruslah diberi penyadaran akan pengetahuan yang beraneka ragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas mengenai pengetahuan global, termasuk salah satu diantaranya aspek kebudayaan. Dikarenakan beragamnya budaya di dalam maupun di luar negeri, maka peserta didik sangat perlu diberi materi mengenai pemahaman multi budaya atau pendidikan multikultural agar peserta didik tidak kehilangan arah dan tidak tercerabut dari akar budayanya.

3) Sebagai landasan pengembangan kurikulum Nasional

Kurikulum merupakan acuan utama dalam pelaksanaan pembelajaran, yang akan memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang memerlukan pengembangan sesuai dengan perkembangan zaman.

Melalui pembelajaran berbasis multikultural, sikap dan mindset (pemikiran) peserta didik akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman. Hal ini penting untuk menghapuskan praktek diskriminasi. Dengan pembelajaran multikultural para lulusan akan dapat memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan menyelesaikan segala problem kehidupannya. Beberapa keuntungan pendidikan multikultural, pendidikan multikultural merupakan sebuah proses dimana seseorang mengembangkan kompetensi dalam beberapa sistem standar untuk mempersepsi, meyakini, dan mangaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Memasukkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan

agama Islam merupakan suatu keniscayaan, sebagai upaya dan langkah kongkrit dalam mentransformasikan pola pemahaman keagamaan yang inklusif, dinamis, dan fleksibel dengan tanpa mengabaikan dimensi-dimensi kesakralan ajaran agama. Munculnya wacana dan pemikiran ini merefleksikan problem kontemporer yang tengah melanda bangsa ini yang dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Karena Indonesia sebagai suatu bangsa terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, dan agama.

Keberadaan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme yang secara integral menjadi bagian dari nilai-nilai humanisme, dalam sistem pendidikan agama Islam cenderung diabaikan dan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini bisa dilihat dari content muatan kurikulum pendidikan agama Islam dan pendekatan serta metode yang diterapkan guru dalam proses pendidikan agama Islam.

Gagasan dan konsep pendidikan multikultural diharapkan dapat merekonstruksi kembali kebudayaan nasional Indonesia yang terdiri dari beragam etnis, suku bangsa, budaya, dan agama serta strata sosial, sebagai kenyataan yang tak dapat ditolak dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan multikulturalisme juga diharapkan dapat mengubah paradigma monokultural yang penuh dengan prasangka dan diskriminatif ke paradigma multikulturalisme yang menghargai perbedaan, keragaman, toleransi, dan sikap terbuka, membangun masyarakat berperadaban, toleransi terhadap sesama manusia, mandiri dan mampu mengatur diri sendiri, bebas dari paksaan, ancaman dan kekerasan untuk menuju dan terciptanya masyarakat baru Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Munir Mulkhan. 2005. *Kesalehan Multikultural*, Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah
- Azyumardi Azra.1996. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalis, Modernisme hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina
- Mahpud, Choirul. 2010. *Pendidikan Multikultural*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Putaka Pelajar
- Sutrisno. 2011. *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fadilatama
- Wan Mohd. Nor Daud. 1998. *Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas*, Bandung: Mizan